

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani,*Sosiologi,Sistematika, Teori Dan Terapan,* (Jakarta: BumiAksara,2002)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Peneltian Hukum,* (Jakarta : Rajawali Pers,2011),
- C.S.T.Kansil& Christine S.T. Kansil,*SistemPemerintahan Indonesia,*(Jakarta: PT BumiAksara,2008,
- DasrilRadjab,*Hukum Tata Negara Indonesia,*(Jakarta:PT. Asdi Mahasatya,2005).
- Dwijowijojo,Riant Nugroho,Kebijakan Publik,Formulasi,implementasi dan evaluasi,(Jakarta:PT.Elex Media Komputindo,2004),
- GatotP.Soemartono,*hukumLingkungan Indonesia,*(Jakarta: Sinar Grafika,2004),
- Miftah Toha,*Dimensi-dimensi Prima ilmu Administrasi Negara.*(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002).
- Muhammad Akib,"PolitikHukumLingkungan,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2012).
- Moh.Mahmud MD,*Politik Hukum Di indonesia,*(Jakarta: Rajawali Pers,2011).
- Morisson, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi,* (Jakarta :Ramdina Prakarsa, 2005),
- P.Rosodjatmiko,*Pemerintahan Di Daerah Dan Pelaksanaannya,kumpulan karangan Dr.Ateng Syafrudin S.H,*(Bandung:Tarsito,1982).
- Prof.Drs.HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi,*(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2011).
- Ruslan,Rosady,*Metode PenelitianPublic Relations Dan Komunikasi,* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Subarsono,AG. *AnalisaKebijakanPublik, Konsep, TeoridanAplikasi,* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005).
- Wahab, solichin Abdul, *AnalisisKebijaksanaan; Dari FormulasikeImplentasiKebijaksanaanNegara,*(Jakarta: Bumi Aksara,2005)

Wolfhoff,dikutip dari Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi daerah*,binacipta,1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang ketertiban Umum Kabupaten Bengkalis

PeraturanBupatiBengkalisNomor 23 Tahun 2005
TentangPembentukanOrganisasidan Tata Kerja UPTD PengelolaanPasar,
Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kebupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bengkalis.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.

TAP MPR No.XV Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-undangDasar 1945

Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undangNomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sumberlainnya

<http:// Pedagang Kaki Lima di Kota Duri/2012/12/html?m=1>, 30 Desember 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/kebijakan_publik. 29 Desember 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/pedagangkakilima.30Desember 2014>

<http://m.facebook.com/notes/mpu-alay-rose-berkata/kekeliruan-dosen-dan-mahasiswa-dalam-memahami-statistik/10151211464815817>. 12 Februari 2015